

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DI DESA LUBUK RAMO KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Bisnis
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**RATNA JUWITA
NPM. 157110028**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ratna Juwita
NPM : 157110028
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di
Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normative dan kreatif metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta di setujui untuk di uji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Pembimbing

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ratna Juwita
NPM : 157110028
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di
Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

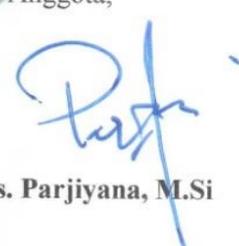
Ketua,

Sekretaris,


Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si
Mengetahui
Wakil Dekan 1,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si
Anggota,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Drs. Parjiyana, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1722/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Ratna Juwita |
| N P M | : 157110028 |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi |
- Struktur Tim :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Parjiyana, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi
 4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

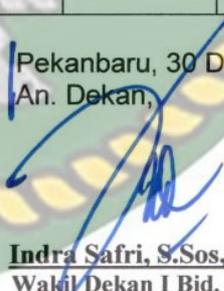
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1722/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Desember 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ratna Juwita
NPM : 157110028
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

Nilai Ujian : Angka : "79" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ratna Juwita
NPM : 157110634
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di
Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris,

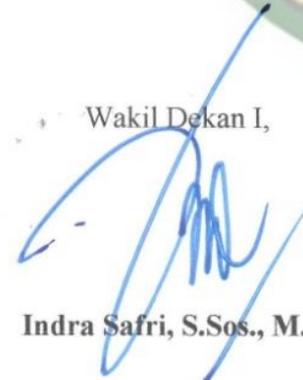
Ketua,


Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si

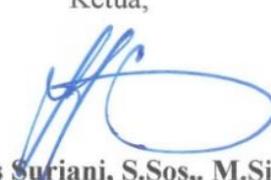

Lilis Suriani S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*
(QS. Al Insyirah : 5-6)

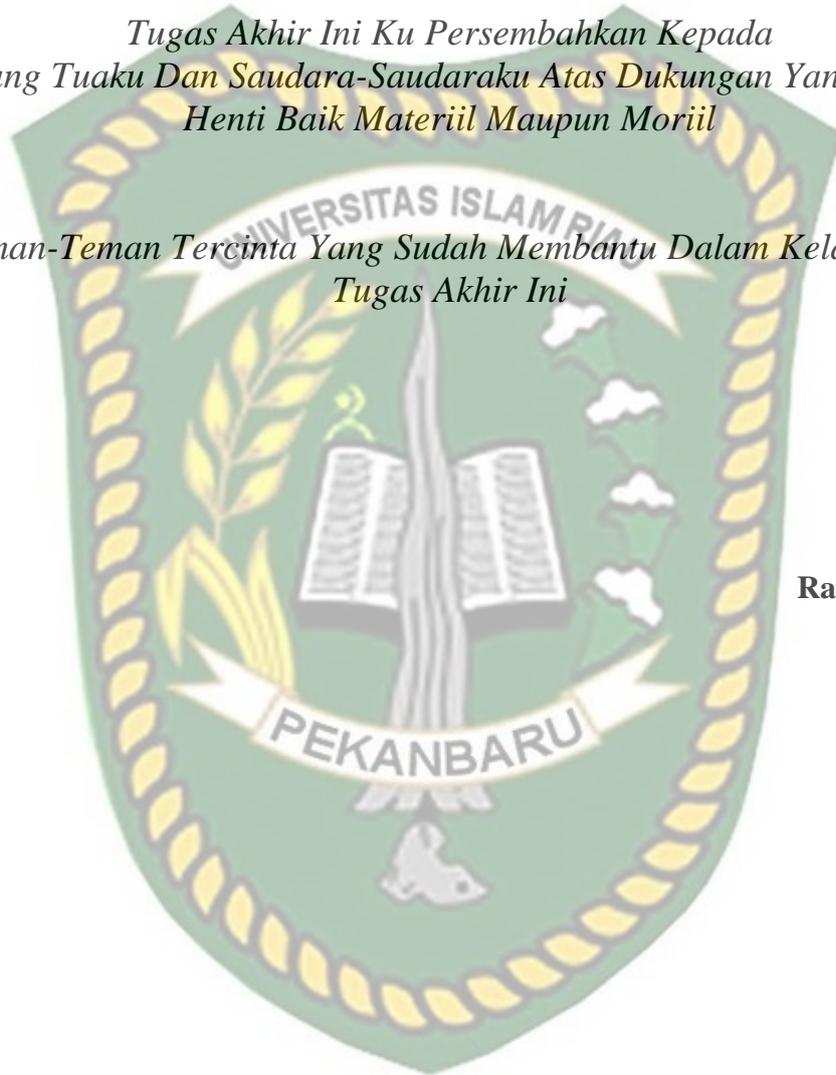
*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya*
(QS. Al Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir Ini Ku Persembahkan Kepada
Orang Tuaku Dan Saudara-Saudaraku Atas Dukungan Yang Tiada
Henti Baik Materil Maupun Moriil*

*Teman-Teman Tercinta Yang Sudah Membantu Dalam Kelancaran
Tugas Akhir Ini*



Ratna Juwita

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini, dengan demikian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kemakluman dan bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang sangat besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak Indra Safri, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan

ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf/pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru umumnya, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
8. Kepala Desa serta perangkat Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.
9. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tersayang dan semua sahabat yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah Swt semoga jasa baik beliau mendapatkan balasan dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

Ratna Juwita

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
SURAT PERNYATAAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Organisasi	14
3. Konsep Manajemen	17
4. Kebijakan Publik.....	20
5. Implementasi Kebijakan Publik.....	22
B. Kerangka Pikir	29
C. Konsep Operasional.....	30

D. Operasional Variabel	31
E. Teknik Pengukuran	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Kuantan Singingi	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	52
1. Usia	52
2. Jenis Kelamin.....	52
3. Pendidikan	53
B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	54
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	56
2. Sumber Daya.....	57
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	59
4. Sikap Kecenderungan Para pelaksana	61
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas	63
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	65
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	68

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Susunan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016.....	5
Tabel I.2	Data Jumlah Penerima Program BPNT Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
Tabel I.3	Program BPNT Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	9
Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	31
Tabel III.1	Populasi Penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	39
Tabel IV.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	44
Tabel IV.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
Tabel IV.3	Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi	48
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi	49
Tabel IV.5	Jumlah Dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi	50
Tabel V.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	52
Tabel V.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel V.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel V.4	Jawaban Responden tentang Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	56
Tabel V.5	Jawaban Responden tentang Sumber Daya	58
Tabel V.6	Jawaban Responden tentang Karakteristik Agen Pelaksana.....	59

Tabel V.7	Jawaban Responden tentang Sikap Kecenderungan Para Pelaksana	62
Tabel V.8	Jawaban Responden tentang Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas	63
Tabel V.9	Jawaban Responden tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik	65



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi .	30
Gambar II.1	Kerangka Pikir tentang Analisis Pelayanan Publik Pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	36
Gambar III.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	73
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	87
Lampiran 3 Surat-Surat Pendukung.....	91



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Juwita
NPM : 157110028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di
Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memnuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
Pelaku pernyataan




Ratna Juwita

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI
DESA LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Ratna Juwita
NPM. 157110028**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial, sedangkan responden penelitian adalah 60 orang masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner, dimana asil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Berdasarkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan termasuk pada kategori cukup terimplementasi, indikator sumber daya termasuk pada kategori cukup terimplementasi, indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi, indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi, dan indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas termasuk pada kategori cukup terimplementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai

**IMPLEMENTATION OF THE NON CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM
IN LUBUK RAMO VILLAGE, KUANTAN MUDIK DISTRICT
KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

**Ratna Juwita
NPM. 157110028**

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of the Non-Cash Food Assistance program in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The informants in this study were the Head of the Department of Social and Community Empowerment of Kuantan Singingi Regency, Section for Empowerment of PMKS and Social Institutions, while the research respondents were 60 people who received non-cash food assistance. The data of this study were sourced from primary data obtained through interviews and questionnaires, where the results of this study were analyzed descriptively. Based on the results of the research, it is known that based on the indicators of the size and objectives of the policy are included in the moderately implemented category, the resource indicators are included in the moderately implemented category, the implementing agency characteristics indicators are in the moderately implemented category, the implementing agency characteristics indicators are in the moderately implemented category, and communication indicators between organizations and activities are included in the moderately implemented category.

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Assistance Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu saling membutuhkan antar sesamanya, oleh sebab itu manusia hidup berkelompok. Dalam hidup berkelompok ini disebabkan karena setiap orang sebagai makhluk mempunyai kebutuhan bersama atau kebutuhan sosial. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya terus mengalami peningkatan bersamaan dengan usia yang bertambah dan berkembangnya zaman. Manusia modern kebutuhannya lebih banyak dari pada kebutuhan manusia tradisional. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik dan psikologis, baik secara individual maupun kelompok. Jumlah kelompok juga semakin banyak. Setiap orang tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Supaya kebutuhan manusia serta kelompok terpenuhi maka manusia membentuk organisasi.

Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah,

dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Pada era globalisasi dan seiring dengan kemajuan zaman, sebagai suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan yang terjadi serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu organisasi perangkat pemerintah daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan standar kerja kepada pegawai dilingkungannya sebagaimana yang diinginkan pemerintah pusat, untuk membangun wilayah kerjanya yakni Kabupaten Kuantan Singingi.

Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sangat memerlukan sumber daya manusia (*SDM-Human Resources*) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang membawahi 3 bagian
 - a. Sub bagian program
 - b. Sub bagian umum
 - c. Sub bagian keuangan
3. Bidang pemberdayaan sosial:
 - a. Seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan sosial
 - b. Seksi penanggulangan kemiskinan
 - c. Seksi pengembangan kesejahteraan sosial
4. Bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitasi sosial terdiri dari :
 - a. Seksi perlindungan dan jamsos
 - b. Seksi penanganan bencana
 - c. Seksi rehabilitasi sosial
5. Bidang pemberdayaan desa terdiri dari :
 - a. Seksi penataan dan kerjasama desa
 - b. Seksi administrasi pemerintahan desa
 - c. Seksi keuangan dan aset desa
6. Bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Seksi pemberdayaan ekonomi desa
 - c. Seksi pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu bidang yang ada di Instansi Dinas Sosial yang memiliki 3 seksi diantaranya adalah seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan sosial. PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Peneliti memfokuskan penelitian pada seksi PMKS karena masalah umum yang cukup banyak terjadi di masyarakat adalah masalah kesejahteraan yang bisa dialami dari usia muda sampai dengan usia tua. Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan pada Bidang Pemberdayaan Sosial khususnya Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial karena bidang ini terkait langsung dengan permasalahan sosial.

Adapun susunan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.1 : Susunan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Hj.Rukmi, S.Sos	Bidang pemberdayaan sosial	<p>Tugas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial.</p> <p>Menyelenggarakan Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial; 2. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan Sosial; 3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial; 4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
			fungsinya
2	Nila Kusnita, S.Sos, M.Si	Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan sosial	<p>Tugas: penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial.</p> <p>Menyelenggarakan Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 2. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial 4. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 5. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 7. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial; 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial melalui Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial mengeluarkan sebuah program yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai wujud nyata penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin sosial dan membantu masyarakat keluar dari permasalahan sosial ini.

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warung. Elektronik Warung Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warung, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Dasar hukum program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM;
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)
6. Mekanisme pelaksanaan program BPNT ini diawali dengan pertemuan awal dan validasi data, jika penerima manfaat memenuhi syarat maka selanjutnya dilakukan tahap verifikasi data. Setelah verifikasi data selesai maka

penerima dinyatakan sah untuk mengikuti program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Kriteria penerima program BPNT ini diantaranya adalah masyarakat yang tergolong miskin, lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang paling banyak memiliki desa dibandingkan kecamatan lainnya. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik adalah Desa Lubuk Ramo. Masyarakat Desa Lubuk Ramo juga menerima BPNT dari Kabupate Kuantan Singingi. Jumlah masyarakat penerima program BPNT di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Data Jumlah Penerima Program BPNT Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Jumlah Penerima	Persentase
2017	42	-
2018	51	21,43
2019	77	50,98
2020	62	-19,48

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui data penerima program BPNT tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai peningkatan sebesar 50,98% dan mengalami penurunan di tahun 2020 sehingga mengalami penurunan sebesar 19,48%. Hal ini disebabkan karena jumlah masyarakat yang

seharusnya menerima program bantuan tersebut sudah terdata sesuai kondisi dilapangan.

Adapun program-program yang dilakukan BPNT diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Program BPNT Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Program	Keterangan
1	Pembagian Sembako	Melibatkan RT/RW setempat dengan jangka waktu maksimal 3 hari
2	Kegiatan Khitanan Massal	Melibatkan RT/RW setempat dengan jangka waktu 1 hari
3	Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Tergolong Miskin	Melibatkan RT/RW setempat dengan jangka waktu 1 hari
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Melibatkan RT/RW setempat dengan jangka waktu sesuai kebutuhan

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Berdasarkan hasil prasurvei sementara terdapat berbagai permasalahan yang terjadi selama program ini berjalan diantaranya tidak terpenuhinya pemberian bantuan kepada masyarakat, artinya begitu banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membutuhkan bantuan, sedangkan dana yang tersedia belum terpenuhi untuk memenuhi pemberian bantuan kepada PMKS tersebut bahkan untuk 2020 belum ada anggaran yang diperuntukkan bagi program BPNT.

Berdasarkan Tabel 1.3 Program BPNT Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi di atas untuk diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya dalam mengatasi permasalahan terkait dengan PMKS. Hasil prasurvei sementara menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Banyak PMKS yang belum menerima bantuan disebabkan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah.
2. Masih kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Masih kurangnya perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terhadap situasi yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dibuktikan dengan jumlah PMKS yang masih cukup tinggi beberapa tahun terakhir.

Dari latar belakang dan fenomena atau gejala di atas, dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang mengkaji tentang **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimanakah implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoretis, dapat menambah wawasan ilmu administrasi dan sumber daya manusia mengenai kinerja pegawai
- b. Praktis, memberikan masukan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi penelitian mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mencakup keseluruhan aktivitas kerja sama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah disepakati bersama-sama sebelumnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhannya dengan sendiri namun dalam memenuhi kebutuhannya yang beragam akan membutuhkan orang lain. Berarti akan terjalannya kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, ini juga bisa dikatakan kegiatan administrasi secara sederhana.

Kata administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministro* (latin) yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Definisi administrasi yang sederhana ini adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan (Fathoni, 2006; 17).

Dalam arti sempit administrasi adalah tata usaha. Sedangkan pada pengertian luas administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2014; 65).

Definisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan.

Siagian dalam Fathoni (2006; 15) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian Heneman dalam Fathoni (2006; 15) memberikan pengertian administrasi adalah administrasi sebagai kegiatan dari sekelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Pengertian administrasi negara pada masa awal perkembangan ilmu administrasi, dirumuskan sebagai pelaksanaan kebijakan negara (*public policy*), dengan pelaksanaannya lembaga eksekutif (pemerintah). Kebijakan negara tersebut dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga administrasi negara sering kali disebut pelaksanaan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam kaitan itu pula, secara silih berganti administrasi negara diberi predikat sebagai;

- a. Penyelenggaraan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (Pffifner dalam Nawawi, 2013; 84)
- b. Terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (White dalam Nawawi, 2013; 84)

Dalam hal ini hubungan ini maka yang termasuk ke dalam lingkup administrasi negara bukan saja mengenai masalah pelaksanaan kebijakan tetapi juga masalah perumusan dan penentuan kebijakan (White dalam Nawawi, 2013;

84). Bahkan terdapat pandangan yang menyatakan bahwa administrasi negara merupakan aktivitas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta saling hubungan antara sesamanya (Nigro dalam Nawawi, 2013; 84). Rangkaian aktivitas tersebut secara ringkas tercakup dalam istilah pengelolaan atau penyelenggaraan kebijakan (*governance*) atau sesuatu yang biasa juga sebagai manajemen yang dalam hal ini adalah manajemen publik atau pemerintahan (Nawawi, 2013; 84).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih manusia dengan menggunakan akal sehat dalam menentukan tindakan dan sikap dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Konsep Organisasi

Organisasi sebagai wadah sekumpulan manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.

Menurut Barnad dalam Fathoni (2006; 26) merupakan suatu sistem, yaitu sistem sosial yang dinamis dari hubungan kerja sama yang bertujuan untuk memuaskan keperluan orang-orang. Sedangkan menurut Gullet dalam Fathoni (2006; 26) organisasi sebagai suatu proses yang tersusun dalam orang-orang berhubungan untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins (2003; 4), organisasi sebagai *a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary that function or relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goal* (sebagai entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan).

Menurut Manullang dalam Hasibuan (2006;119) menyatakan bahwa organisasi adalah

Suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

Menurut Dale dalam Subkhi dan Jauhar (2013; 3) organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Sedangkan menurut Soffer dalam Subkhi dan Jauhar (2013; 3) organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian di mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Sedangkan organisasi menurut Pradjudi Atmosudiro dalam Hasibuan, (2006; 120) adalah struktur tata

pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas, adalah:

- a. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
- d. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
- e. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati
- f. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
- g. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
- h. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

Menurut Hasibuan (2006; 122) yang termasuk kedalam unsur-unsur organisasi adalah:

- a. Manusia (*human factor*) artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan)
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya
- c. Tujuan artinya organisasi itu baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai
- d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya
- e. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya
- f. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis

- g. Lingkungan (environment external social system) artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengatur pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi (Siagian, 2003;5)

Menurut Hasibuan (2010;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Stoner manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian pemimpin, mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi sasaran, organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005;28).

Menurut Siswanto (2009;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Sementara itu Handoko (1997;6) menjelaskan ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu:

- a. Untuk mencapai tujuan
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Siagian membagi atas lima fungsi manajemen antara lain: perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Pemberian motivasi dibutuhkan dalam menggerakkan partisipasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pada kantor terkait. Dalam upaya pemberian motivasi kepada pegawai, pimpinan dihadapkan kepada beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian khusus agar pemberian motivasi dapat tercapai.

Menurut Hasibuan (2012;9) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsure (6 M) yaitu; *man, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *man* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yaitu disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang

mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia maka dapat di artikan bahwa salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Rivai, 2013: 1). Sementara itu Schermerhorn (1999: 314) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja organisasional yang berbakat dan bersemangat.

Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang. Sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lainnya. Manusia yang memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memiliharnya, di samping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan yang lainnya oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia merupakan aktifitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengelola, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakan, untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Tua, *human resource management is the activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing within the organization.* Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi (dalam Sunyoto, 2012;1)

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Selanjutnya Martoyo (2000;25) yang mengatakan bahwa Aktifitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Manajemen sumber daya merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang pada garis besarnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, penilaian, pengembangan, pengkompesasian, pemeliharaan kepuasan kerja dan motivasi kerja serta meningkatkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pekerja. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada beberapa sasaran sosial, sasaran organisasi, sasaran fungsional, dan sasaran individual sebagai arah dari semua tindakan yang akan dilakukan.

4. Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Winarno, 2002;20).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu Charles Lindblom dalam Budi Winarno (2002;35) menjelaskan ada 5 indikator di dalam pembuata sebuah kebijakan publik, diantaranya :

- a. Perumusan masalah (penyusunan agenda)
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. *Forecasting* (formulasi kebijakan)
Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
- c. Rekomendasi kebijakan (adopsi kebijakan)
Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- d. *Monitoring* kebijakan (implementasi kebijakan)
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- e. *Evaluasi* kebijakan (penilaian kebijakan)
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Kelima indikator ini penting diperhatikan setiap merumuskan sebuah kebijakan oleh para pembuat kebijakan. Pencapaian di dalam perumusan sebuah kebijakan akan tepat sasaran dalam implementasinya atau pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Winarno (2012:144) mengatakan, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam konsep implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Model implementasi kebijakan publik diantaranya yaitu:

a. Implementasi Kebijakan Model Donal Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (Agustino, 2014:141). Menurut Van Metter dan Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yakni (2014:142-144):

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistik dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan penentu keberhasilan proses implementasi. Proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik.

Sumberdaya-sumberdaya lain di luar sumberdaya manusia juga perlu dipertimbangkan, seperti sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

Ketika sumberdaya yang kompeten dan kapabel sudah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Begitu juga dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan anggaran berjalan dengan baik tetapi terbentu dengan persoalan waktu yang terlalu ketat maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakadilan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu sumberdaya yang dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut yaitu sumberdaya manusia, finansial atau keuangan dan waktu.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal, hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan dan sanksi hukum, sedangkan kebijakan publik yang tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka bisa saja agen pelaksana yang ditugaskan memiliki karakteristik yang biasa saja.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan/penolakan dari (agen) pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan atau ada atau tidak kinerja implementasi kebijakan publik,

karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil formulasi warga setempat yang mengenal permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kebijakan yang dilaksanakan merupakan kebijakan “dari atas” (*top down*) yang tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begutu sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward

Edward III dalam Subarsono (2013:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel besar, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh secara lebih mendalam.

Menurut Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (dalam Tachjan, 2013;42).

Salusu (dalam Tahir, 2014:55-56) menyatakan bahwa implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

Jadi secara etimologis, dikemukakan oleh Tachjan (2013;51) implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, menurut Tachjan (2013;52) maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (dalam Tachjan, 2013;49) mengemukakan bahwa: *“policy implementation is the application of the policy by the governments administrative machinery to the problem”*. Kemudian Edwards III (dalam Tachjan, 2013;58) mengemukakan bahwa : *“policy implementation,... is the stage of policy making between the establishment of a policy... and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Sedangkan Grindle (dalam Tachjan, 2006;25) mengemukakan bahwa : *“implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya sebagai sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diperlukan untuk mengetahui alur pikiran dari penelitian, sehingga diketahui dasar pikiran hingga landasan pikirnya. Kerangka pikir mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



C. Konsep Operasional

Konsep dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian dalam Fathoni, 2006; 15).

2. Organisasi

Organisasi sebagai suatu proses yang tersusun dalam orang-orang berhubungan untuk mencapai tujuan (Gullet dalam Fathoni, 2006; 26).

3. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2010;2).

4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank (kemensos.go.id, 2021)

D. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun operasionalnya variabelnya adalah sebagai berikut.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Implementasi adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Tachjan (2013;52).	Implementasi	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Tujuan program BPNT b. Sasaran program BPNT	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi
		Sumberdaya	a. Sumberdaya manusia b. Sumberdaya finansial c. Sumberdaya waktu	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi
		Karakteristik agen pelaksana	a. Karakteristik aktor-aktor pelaksana program BPNT b. Peran dan tugas dari aktor-aktor pelaksana program BPNT	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi
		Sikap/Kecondongan Para Pelaksana	a. Kejelasan tupoksi agen pelaksana program BPNT b. Sikap aktor pelaksana program BPTN	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi
		Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	a. Sosialisasi terhadap pelaksana program BPNT b. Koordinasi antar lembaga yang terlibat	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi
		Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	a. Sosial masyarakat b. Ekonomi masyarakat	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang terimplementasi

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat dinilai melalui indikator berikut ini:

Ukuran Variabel

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

Indikator Ukuran Variabel

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

2. Sumberdaya

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

3. Karakteristik agen pelaksana

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

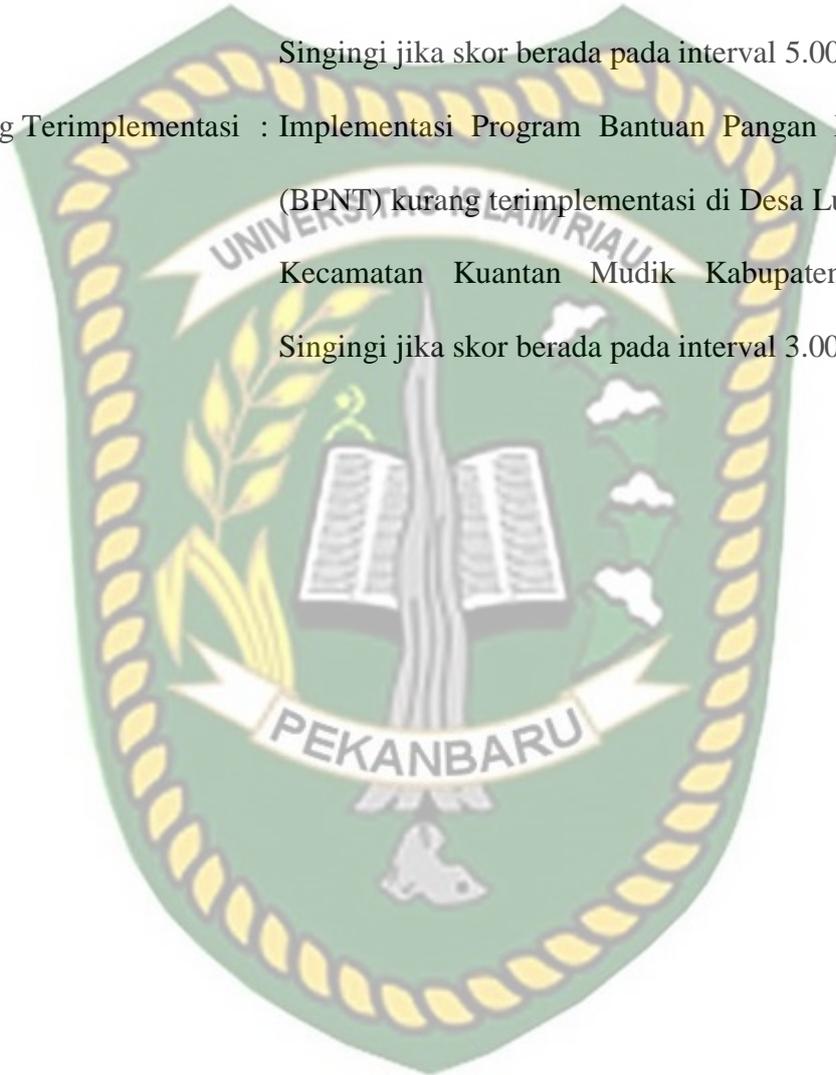
Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terlaksana di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terimplementasi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang terimplementasi di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sebagaimana dikatakan Sugiyono (2012;13), bahwa “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.” Dalam hal ini data-data angka berasal dari hasil penyebaran angket tentang Implementasi Program BPNT di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan tempat tersebut karena berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu permasalahan implementasi program BPNT di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menerima BPNT di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang

berjumlah 60 orang. Karena populasinya sedikit, maka peneliti mengambil seluruh subjek populasi untuk dijadikan sampel penelitian atau dengan kata lain teknik penentuan sampelnya menggunakan sampel jenuh atau sensus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Populasi Penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
2	Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial	1	1	100%
3	Masyarakat penerima bantuan BPNT	60	60	100%
	Jumlah	62	62	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama atau pokok dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yaitu berupa data jawaban kuisioner tentang implementasi program BPNT di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, dan pendukung lainnya. Data ini dapat berupa jenis data kuantitatif dan kuantitatif, dimana

data kuantitatifnya berupa profil, struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dari responden, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh sampel atau suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada sampel dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan instrument berupa lembar daftar pertanyaan tadi dapat berupa angket (kuesioner), *checkist* ataupun tanda silang.

2. Observasi (*Observation*)

Observasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan teknik kuesioner dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

3. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2010;157).

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk melihat atau mengabadikan dokumen-dokumen atau arsip seperti sebuah momen, baik foto, rekaman, dan surat-surat yang diperoleh selama penelitian dan berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Analisis Data

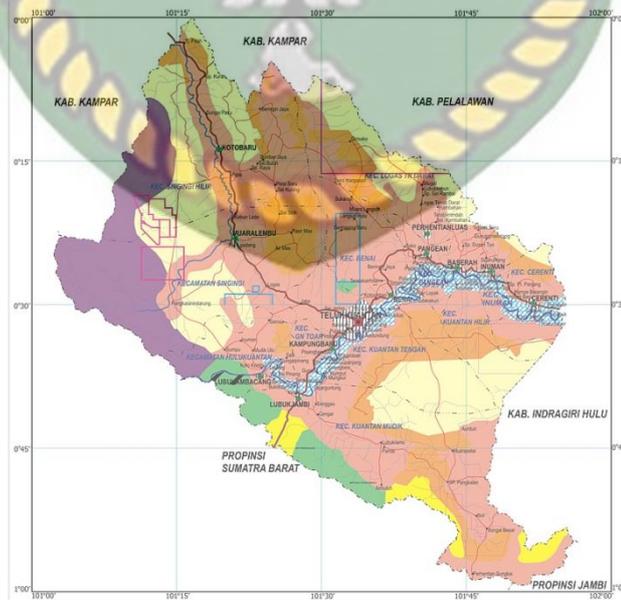
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif yang diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang telah ditentukan, kemudian diambil kesimpulannya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.



Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah $\pm 7.656 \text{ Km}^2$ (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi

Riau dengan jarak dari laut berkisar \pm 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kecamatan:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564,28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384,40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165,25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145,70	14.570	1,9
7	Benai	124,66	12.466	1,63
8	Pangean	145,32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380,34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114,29	11.429	1,49
12	Inuman	450,01	45.001	5,88
13	Cerenti	456,00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.530,97	153.097	20,00
Jumlah		7.656,03	765.603	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas

adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan di atas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara topografi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah perbukitan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang

merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebanyak 310.619 jiwa. Yeng terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pucuk Rantau	5.895	5.040	10.935
2	Kuantan Mudik	11.549	11.329	22.878
3	Hulu Kuantan	4.386	4.191	8.577
4	Gunung Toar	6.807	6.699	13.496
5	Kuantan Tengah	23.981	22.971	46.722
6	Sentajo Raya	14.293	13.595	27.888
7	Benai	7.900	7.922	15.822
8	Pangean	9.085	9.163	18.248

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
9	Logas Tanah Darat	10.535	9.620	20.155
10	Kuantan Hilir	7.414	7.325	14.739
11	Kuantan Hilir Seberang	6.502	6.428	12.930
12	Inuman	7.680	7.623	15.303
13	Cerenti	7.612	7.336	14.948
14	Singingi	16.284	14.524	30.722
15	Singingi Hilir	19.593	17.563	37.156
	Jumlah	159.480	151.139	310.619

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sector perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan

terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel IV.3 Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Usaha	Persentase
1	Pertanian	61,95
2	Pertambangan	2,77
3	Industri	1,74
4	Listrik, Gas dan Air	0,10
5	Kontruksi	2,15
6	Perdagangan	13,85
7	Hotel	0,92
8	Transportasi/Komunikasi	1,64
9	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
Jumlah		100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

5. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berikut adalah jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai berikut:

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA/SMK	Universitas
1	Pucuk Rantau		7	5	1	
2	Kuantan Mudik	13	21	6	2	
3	Hulu Kuantan	4	9	2	1	
4	Gunung Toar	8	12	4	1	
5	Kuantan Tengah	27	30	7	6	1
6	Sentajo Raya		22	7	2	
7	Benai	22	18	4	2	
8	Pangean	16	19	5	2	
9	Logas Tanah Darat	12	17	4	3	
10	Kuantan Hilir	15	12	4	1	
11	Kuantan Hilir Seberang		10	2	1	
12	Inuman	10	16	6	1	
13	Cerenti	9	12	3	2	
14	Singingi	19	18	5	2	
15	Singingi Hilir	19	21	6	4	
Jumlah		162	242	70	31	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

b. Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten

Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

6. Struktur Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara administrasi terdiri dari 15 wilayah kecamatan, dan setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dari 15 kecamatan, terdapat 218 desa, dan 11 kelurahan. Tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wilayah kelurahan. Kecamatan yang memiliki kelurahan adalah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Cerenti.

Tabel IV.5 Jumlah Dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Jumlah Desa/Kelurahan
		Desa	Kelurahan	
1	Pucuk Rantau	10	-	10
2	Kuantan Mudik	23	1	24
3	Hulu Kuantan	12	-	12
4	Gunung Toar	14	-	14
5	Kuantan Tengah	20	3	23
6	Sentajo Raya	14	1	15
7	Benai	15	1	16
8	Pangean	17	-	17
9	Logas Tanah Darat	15	-	15
10	Kuantan Hilir	14	2	16
11	Kuantan Hilir Seberang	14	-	14
12	Inuman	14	-	14
13	Cerenti	11	2	13
14	Singingi	13	1	14
15	Singingi Hilir	12	-	12
Jumlah		218	11	229

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Data dari Tabel IV.5 menunjukkan bahwa Kecamatan Kuantan Mudik walaupun bukan kecamatan terluas dan berpenduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 23 desa dan 1 kelurahan. Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 7 kecamatan yang tidak memiliki wilayah kelurahan, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Datar, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Seberang dan Kecamatan Inuman.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 60 orang penerima BPNT di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Identitas responden diperoleh dari hasil pengisian kuesioner meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hasilnya diperoleh sebagai berikut ini.

1. Umur

Data mengenai umur langsung diisi dalam bentuk angka oleh 60 orang responden pada lembaran kuesioner. Rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 35 Tahun	7	11,67%
2	35 – 40 Tahun	29	48,33%
3	41 – 45 Tahun	16	26,67%
4	> 46 Tahun	8	13,33%
Jumlah		60	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel V.1 tersebut, rentang usia 35 – 40 tahun adalah rentang usia terbanyak, yaitu 29 orang (48,33%) dari 60 responden yang diteliti. Usia terbanyak kedua adalah rentang usia 41 – 45 tahun yaitu 16 responden (26,67%). Kemudian disusul oleh rentang usia di atas 46 tahun dengan 8 responden (13,33%) dan rentang usia < 35 tahun sebanyak 7 orang (11,67%).

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden diketahui setelah seluruh responden memberikan jawaban mengenai jenis kelamin pada lembaran kuesioner yang telah disediakan. Berdasarkan data mengenai jenis kelamin responden, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	38	63,33%
2	Perempuan	22	36,67%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Melalui Tabel V.2 tersebut, bahwa rata-rata responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 38 orang atau 63,33% dari total jumlah seluruh responden yang diteliti. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan ada 22 orang atau 36,67% dari total responden.

3. Pendidikan

Pendidikan responden diketahui setelah seluruh responden memberikan jawaban mengenai pendidikan pada lembaran kuesioner yang telah disediakan. Berdasarkan data mengenai pendidikan responden, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Tamat Sekolah	12	20%
2	SD/ sederajat	24	40%
3	SMP/ sederajat	18	30%
4	SMA/ sederajat	6	10%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Terdapat tujuh kategori pendidikan responden, diketahui bahwa rata-rata pendidikan responden yang diteliti adalah tamatan SD/ sederajat yaitu 24 orang atau 40% dari total responden yang diteliti, sedangkan sisanya adalah tamatan SMP/ sederajat, SMA sederajat dan tidak tamat sekolah.

B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Sosial seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial. Melalui Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial mengeluarkan sebuah program yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Program ini membantu masyarakat miskin sosial dan membantu masyarakat keluar dari permasalahan sosial ini.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai yang diberikan pemerintah setiap bulan kepada KPM yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Kriteria penerima program BPNT ini diantaranya adalah masyarakat yang tergolong miskin, lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Terkait dengan nilai bantuan yang diberikan kepada satu keluarga penerima manfaat yaitu sebesar Rp.110.000/KPM/bln. Keluarga penerima manfaat di Kelurahan Tembong ini setiap bulannya menukarkan jumlah uang yang tertera di rekening masing-masing masyarakat dengan produk pangan yang telah disediakan yaitu beras dan telur. Masyarakat menukarkannya di tempat yang sudah disediakan oleh para pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai ini yaitu dinamakan e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota himbara sesuai harga yang berlaku. E-warong (elektronik warung gotong royong) memiliki kriteria yaitu :

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (dua diligence) sesuai dengan kebijakakn dan prosedur bank penyalur;
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;
3. Memliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/took dengan pemasok/distributor bahan pangann yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
4. Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar;
5. Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan (khusus bagi KPM lansia dan KPM disabilitas)
- 7.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kuesioner tentang ukuran dan tujuan kebijakan terdiri dari 2 (dua) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban 'a' diberikan skor 3, jawaban 'b' diberikan skor 2, dan jawaban 'c' diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.4 Jawaban Responden tentang Ukuran dan Tujuan Kebijakan

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Tujuan program BPNT	24 (40%)	34 (57%)	2 (3%)	60 (100%)
2	Sasaran program BPNT	17 (28%)	31 (52%)	12 (20%)	60 (100%)
Jumlah		41	65	14	120
Total Skor		123	130	14	267
Rata-rata (%)		21 (35%)	32 (53,33%)	7 (11,67%)	60 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan diketahui untuk indikator ukuran dan tujuan kebijakan termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 32 orang (53,33%), kemudian menjawab terimplementasi sebanyak 21 orang (35%) dan responden yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 7 orang (11,67%).

Pada item penilaian tujuan program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 24 orang, yang menjawab cukup terimplementasi

sebanyak 34 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 2 orang. Pada item penilaian sasaran program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 17 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 31 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 12 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Iya, kami pihak pemerintah kecamatan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyaluran BPNT dengan pihak Tenaga TKSK Kecamatan Kuantan Mudik dengan dan dihadiri pihak pemerintah desa dan kelurahan yang ada di Kuantan Mudik ” (Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 18 September 2021).”

“Sejauh yang saya rasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat baik tujuannya, membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi, setidaknya warga tidak kesulitan dari membeli kebutuhan pokoknya karena sudah ada bantuan ini” (Wawancara dengan Masyarakat Tanggal 19 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa masyarakat merasa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

2. Sumber Daya

Kuesioner tentang sumber daya terdiri dari 3 (tiga) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban ‘a’ diberikan skor 3, jawaban ‘b; diberikan skor 2, dan jawaban ‘c’ diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.5 Jawaban Responden tentang Sumber Daya

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Sumber daya manusia	7 (12%)	35 (58%)	18 (30%)	60 (100%)
2	Sumber daya finansial	21 (35%)	26 (43%)	13 (22%)	60 (100%)
3	Sumber daya waktu	19 (32%)	33 (55%)	8 (13%)	60 (100%)
Jumlah		47	94	39	189
Total Skor		141	188	39	368
Rata-rata (%)		16 (26%)	31 (52%)	13 (22%)	60 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan diketahui untuk indikator sumber daya termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 31 orang (52%), kemudian menjawab terimplementasi sebanyak 16 orang (26%) dan responden yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 13 orang (22%).

Pada item penilaian sumber daya manusia responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 7 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 35 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 18 orang. Pada item penilaian sumber daya finansial responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 21 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 26 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 13 orang. Pada item penilaian sumber daya waktu responden yang menjawab

terimplementasi sebanyak 19 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 33 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 8 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Sumber daya yang masih belum sesuai target adalah dari sumber daya keuangan, sedangkan sumber daya manusia dan sumber daya waktu itu sudah cukup memadai bagi kami sebagai pelaksana, hanya dari segi anggaran yang masih belum mencukupi” (Wawancara dengan Seksi Pemberdayaan PMKS dan kelembagaan Sosial Tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa dari ketersediaan sumber daya, diketahui sumber daya keuangan (finansial) masih ada kendala, sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya penyaluran dana kepada masyarakat yang menerima bantuan BPNT.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kuesioner tentang karakteristik agen pelaksana terdiri dari 2 (dua) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban ‘a’ diberikan skor 3, jawaban ‘b’ diberikan skor 2, dan jawaban ‘c’ diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.6 Jawaban Responden tentang Karakteristik Agen Pelaksana

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Karakteristik aktor-aktor pelaksana program BPNT	17 (28%)	31 (52%)	12 (20%)	60 (100%)
2	Peran dan tugas dari aktor-	7	35	18	60

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	aktor pelaksana program BPNT	(12%)	(58%)	(30%)	(100%)
	Jumlah	24	66	30	120
	Total Skor	72	132	30	234
	Rata-rata (%)	12 (20%)	33 (55%)	15 (25%)	60 (100%)
	Kategori Pengukuran	Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan diketahui untuk indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 33 orang (55%), kemudian menjawab kurang terimplementasi sebanyak 15 orang (25%) dan responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 12 orang (20%).

Pada item penilaian karakteristik aktor-aktor pelaksana program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 17 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 31 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 12 orang. Pada item penilaian peran dan tugas dari aktor-aktor pelaksana program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 7 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 35 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 18 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainnya itu pertama memang menyurat, pihak BNI menyurat ke TIKOR Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK kemudian ke Agen. Biasanya Agen juga lebih cepat karena Agen punya mesin EDC. Justru Agen juga sekarang biasa heran karena masyarakat lebih cepat tau bahwa sudah ada saldo yang masuk. Mereka juga kalau hari ini rekeningnya sudah masuk saldonya itu hari juga kalau dia mau gesek atau belanja di eWarong ya itu bisa dia belanjakan. Penyampaian tentang BPNT ini dilakukan sama pendamping setiap desa dan kelurahan kemudian kami sebagai agen mempersiapkan bahan pangan yang siap dibeli oleh KPM, Komunikasinya bagus, kan pertama koordinasi itu dari kecamatan, nanti kalau sudah masuk saldonya itu nanti kita cek saldonya itu. Kalau sudah masuk saldonya kita hubungi KPM baru kita laporkan jadwalkan bilang tanggal sekian” (Hasil wawancara dengan Agen pada tanggal 20 September 2021).

“Petugas atau pelaksana program ini secara berkelanjutan memberikan petunjuk kepada kami sebagai penerima bantuan, membantu prosedur pengurusan bantuan ini” (Wawancara dengan Masyarakat Tanggal 19 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa dari ketersediaan sumber daya, diketahui sumber daya keuangan (finansial) masih ada kendala, sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya penyaluran dana kepada masyarakat yang menerima bantuan BPNT.

4. Sikap Kecenderungan Para pelaksana

Kuesioner tentang sikap kecenderungan para pelaksana terdiri dari 2 (dua) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban ‘a’ diberikan skor 3, jawaban ‘b’ diberikan skor 2, dan jawaban ‘c’ diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.7 Jawaban Responden tentang Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Kejelasan tupoksi agen pelaksana program BPNT	19 (32%)	33 (55%)	8 (13%)	60 (100%)
2	Sikap aktor pelaksana program BPTN	24 (40%)	34 (57%)	2 (3%)	60 (100%)
Jumlah		43	67	10	120
Total Skor		129	134	10	273
Rata-rata (%)		21 (36%)	34 (56%)	5 (8%)	60 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan diketahui untuk indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 34 orang (56%), kemudian menjawab kurang terimplementasi sebanyak 21 orang (36%) dan responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 5 orang (8%).

Pada item penilaian kejelasan tupoksi agen pelaksana program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 19 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 33 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 8 orang. Pada item penilaian sikap aktor pelaksana program BPTN responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 24 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 34 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 2 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Tupoksi agen pelaksana program ini sudah jelas ya, dijabarkan dalam buku pedoman BPNT yang sudah kami berikan kepada petugas, selain itu sebelumnya kami juga sudah melakukan pelatihan terkait program yang akan dilaksanakan. Dalam pelatihan ini semua dibahas, sampai bagaimana sikap petugas selama memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima BPNT” (Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa dari tupoksi agen pelaksana BPNT sudah jelas dijabarkan dalam buku pedoman BPNT yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas

Kuesioner tentang komunikasi antar organisasi dan aktivitas terdiri dari 2 (dua) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban ‘a’ diberikan skor 3, jawaban ‘b’ diberikan skor 2, dan jawaban ‘c’ diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.8 Jawaban Responden tentang Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Sosialisasi terhadap pelaksana program BPNT	19 (32%)	33 (55%)	8 (13%)	60 (100%)
2	Koordinasi antar lembaga yang terlibat	21 (35%)	26 (43%)	13 (22%)	60 (100%)
Jumlah		40	59	21	120
Total Skor		120	118	21	259

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	Rata-rata (%)	20 (33%)	30 (49%)	10 (18%)	60 (100%)
	Kategori Pengukuran	Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan diketahui untuk indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 30 orang (49%), kemudian menjawab terimplementasi sebanyak 20 orang (33%) dan responden yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 10 orang (18%).

Pada item penilaian sosialisasi terhadap pelaksana program BPNT responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 19 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 33 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 8 orang. Pada item penilaian koordinasi antar lembaga yang terlibat responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 21 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 26 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 13 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Sosialisasi secara rutin dilakukan kepada masyarakat penerima bantuan BPNT, yang agen pelaksanaanya langsung turun ke lapangan untuk menemui masyarakat penerima BPNT secara langsung. Kami biasanya menyebut dengan istilah pendampingan. Dalam pendampingan ini setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi masyarakat penerima bantuan BPNT dibahas

dan akan ditindaklanjuti oleh pendamping” (Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa dari sosialisasi program BPNT di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara rutin dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang diwakili oleh pendamping sebagai agen.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kuesioner tentang lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdiri dari 2 (dua) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban ‘a’ diberikan skor 3, jawaban ‘b’ diberikan skor 2, dan jawaban ‘c’ diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 60 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.9 Jawaban Responden tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Sosial masyarakat	17 (28%)	31 (52%)	12 (20%)	60 (100%)
2	Ekonomi Masyarakat	24 (40%)	34 (57%)	2 (3%)	60 (100%)
Jumlah		41	65	14	120
Total Skor		123	130	14	267
Rata-rata (%)		21 (34%)	32 (54%)	7 (12%)	60 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terimplementasi			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan

diketahui untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi sebanyak 32 orang (54%), kemudian menjawab terimplementasi sebanyak 21 orang (34%) dan responden yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 7 orang (12%).

Pada item penilaian sosial masyarakat responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 179 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 31 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 12 orang. Pada item penilaian ekonomi masyarakat responden yang menjawab terimplementasi sebanyak 24 orang, yang menjawab cukup terimplementasi sebanyak 34 orang dan yang menjawab kurang terimplementasi sebanyak 2 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Program BPNT ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana dengan adanya bantuan ini mereka dapat berbelanja pada agen yang sudah kami tunjuk seperti e-waroeng yang harganya lebih rendah dibandingkan harga secara umum” (Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa manfaat dari program ini adalah membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli kebutuhan sehari-hari pada agen yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai partisipan program ini. Pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak di implementasikan. Program BPNT diharapkan memberikan dampak positif dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Libuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan non tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup terlaksana. Adapun rincian mengenai program bantuan non tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.
2. Berdasarkan indikator sumber daya termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.
3. Berdasarkan indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.
4. Berdasarkan indikator karakteristik agen pelaksana termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.

5. Berdasarkan indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.
6. Berdasarkan indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik termasuk pada kategori cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terimplementasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terdapat beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Perlu adanya melibatkan pihak swasta guna mendukung implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar terwujudnya kesatuan sebagai bentuk kebersamaan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada khususnya di Kecamatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Rambah Lamo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerima informasi terkait bantuan pangan non tunai (BPNT)
3. Peningkatan kualitas SDM agen pelaksana supaya lebih memahami bersama-sama tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) agar tidak

menyelenceng, dan jika sikap tim distributor masih rendah agar lebih memahami tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) supaya kegiatan ini tepat sasaran dan sistem penyalurannya bisa berjalan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka. Cipta.
- Handoko. T. Hani. 1997. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFEE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Hasibuan. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martoyo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Rivai, Veithzal. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwoto. 1986. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan Keenam. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schermerhorn, Jhon. 1999. Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Subkhi, Akhmad dan Mohammad Jauhar. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: alfabeta.

_____. 2012. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Buku Seru.

Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

Syafiie, Inu Kencana. 2014. Pengantar Ilmu Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.

Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumen/Situs Resmi:

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

<https://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>.